

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan interpretasi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019–2023 menunjukkan tren yang meningkat secara bertahap setelah pandemi, tercermin dari naiknya jumlah kunjungan wisatawan berbayar serta peningkatan aktivitas sektor akomodasi dan kuliner. Kenaikan penerimaan pajak hotel dan restoran selama periode tersebut mencerminkan meningkatnya konsumsi wisatawan terhadap layanan penginapan dan makanan-minuman, yang menjadi indikator penting aktivitas pariwisata. Ini membuktikan sektor pariwisata tidak hanya pulih, tetapi juga terus berkembang dan memberikan dampak yang semakin nyata terhadap dinamika ekonomi lokal
2. Secara parsial variabel jumlah kunjungan wisata berbayar memberikan efek positif namun tidak signifikan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023.
3. Secara parsial variabel pajak hotel berdampak negatif signifikan bagi PDRB Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023. Hal ini didasarkan atas tingginya ketetapan pajak hotel sehingga biaya yang ditetapkan untuk konsumen juga tinggi, mengakibatkan banyaknya wisatawan yang lebih memilih penginapan non-formal seperti homestay atau rumah sewa harian karena lebih terjangkau.
4. Secara parsial variabel pajak restoran memberikan dampak positif signifikan bagi PDRB di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023. Hal ini sangat berkaitan, apabila kunjungan wisatawan meningkat maka akan meningkatkan kebutuhan akan konsumsi.
5. Secara simultan keseluruhan variabel independen yakni jumlah kunjungan wisata berbayar, pajak hotel, serta pajak restoran berdampak positif signifikan bagi PDRB di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil temuan, berikut sejumlah saran yang bisa dipertimbangkan untuk kedepannya:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebaiknya terus memperkuat infrastruktur dan promosi destinasi wisata secara berkelanjutan, terutama dengan mengencarkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan fasilitas akomodasi, kuliner, serta atraksi lokal. Perlu juga dilakukan penguatan digitalisasi promosi wisata agar tren kenaikan ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat diperlukan merancang strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan nilai ekonomi dari setiap kunjungan wisatawan, misalnya dengan mendorong pengeluaran wisatawan melalui paket wisata terpadu, peningkatan kualitas layanan wisata, dan pengembangan ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata.
3. Pemerintah Sumatera Barat perlu disarankan untuk mengevaluasi kembali kebijakan tarif pajak hotel agar tidak terlalu membebani konsumen. Pemberian insentif atau keringanan pajak bagi pelaku usaha hotel juga dapat menjadi solusi untuk menjaga daya saing industri perhotelan formal dibandingkan dengan penginapan non-formal.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu mempertahankan dan mengoptimalkan kebijakan pemungutan pajak restoran dengan memastikan bahwa regulasi tersebut tidak menghambat usaha kecil menengah. Dukungan terhadap UMKM kuliner melalui pelatihan, promosi, dan kemudahan perizinan akan mendorong peningkatan kontribusi Pemerintah perlu mempertahankan dan mengoptimalkan kebijakan pemungutan pajak restoran dengan memastikan bahwa regulasi tersebut tidak menghambat usaha kecil menengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan pemangku kepentingan terkait disarankan untuk merancang kebijakan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan potensi seluruh aspek yang berkaitan, baik dari sisi kunjungan wisatawan, akomodasi,

hingga konsumsi. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga penting untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

5.3 Keterbatasan Studi

Penelitian ini telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku, meskipun demikian, masih ada beberapa keterbatasan yang menyertai proses dan hasil penelitian ini. Beberapa keterbatasan penelitian berikut ini :

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel sebagai representasi sektor pariwisata, yakni jumlah kunjungan wisata berbayar, pajak hotel, dan pajak restoran. Padahal, sektor pariwisata sangat luas dan mencakup komponen lain seperti jumlah atraksi wisata, pengeluaran wisatawan, lama tinggal wisatawan, serta ketersediaan transportasi dan infrastruktur yang tidak dimasukkan dalam model.
2. Data kunjungan wisatawan yang digunakan tidak memisahkan antara wisatawan domestik dan mancanegara secara terperinci.
3. Data penelitian hanya data tahunan selama tahun 2019–2023, yang mungkin belum cukup panjang untuk menangkap dinamika jangka panjang, terutama terhadap perubahan struktural di sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19.
4. Penelitian ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder dari instansi pemerintah. Validitas dan kelengkapan data bergantung pada akurasi pelaporan dan keterbukaan lembaga sumber data. Penelitian ini berfokus hanya pada variabel-variabel pariwisata dan belum memasukkan variabel lain yang juga memiliki pengaruh terhadap PDRB, seperti investasi, atau inflasi.